

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

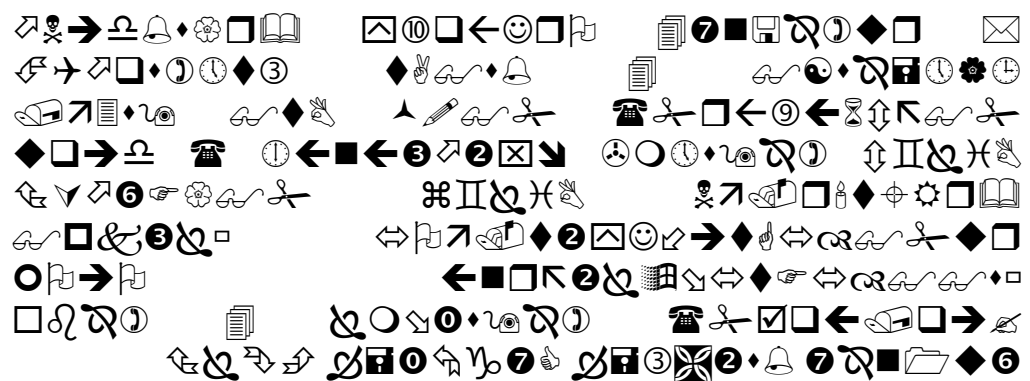
Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa usaha-usaha pembangunan yang selama ini digalakkan pemerintah sudah banyak membawa hasil pada kehidupan masyarakat. Pembangunan yang selama ini dititik beratkan pada sektor formal seperti perancangan industrialisasi suatu wilayah di suatu sisi telah membawa dampak pada percepatan proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bidang ekonomi, sosial, kesehatan dan budaya masyarakat.

Masyarakat akan selalu berubah dan berkembang, contoh dari pemanfaatan suatu perubahan adalah pembangunan, pembangunan ini baik dari segi praserana fisik maupun non fisik, yang pada intinya di tunjukkan untuk meningkatkan kebahagiaan masyarakat, bukan saja secara material tetapi juga diharapkan masyarakat akan semakin sejahtera dan berkehidupan layak ( Pihil Astrid Susanto, 1971. 53 ).

Pertumbuhan penduduk yang begitu pesat juga mendorong laju perubahan dan pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat pula. Kebutuhan akan ekonomi dari masyarakat seiring sejalan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, sepertihalnya kebutuhan akan pasar yang merupakan akses untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di mana transaksi dibutuhkan antara pedagang konsumen berkembang dengan pesat. Pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi produk

maupun baik barang dan jasa, Bik dari segi kualitas, kuantitas, serta tentulah masyarakat konsumen atas pretensi lainnya. Tanpa kita sadari ternyata semakin maju perkembangan zaman ini maka akan semakin cepat terjadi perubahan-perubahan. Sepertihalnya pembangunan bentuk pasar tradisional yang menjadi pasar yang lebih modern dan sekarang banyak kita temukan pasar-pasar kecil lebih propersional seperti Toserba, Mini Market, Alfa Mart, bahkan sekarang bermunculan swalayan-swalayan yang semakin modern dengan pengembangan manajemen yang telah mapan ( Kasmir, 2006. 156 ).

Etos kerja islam pada hakikatnya merupakan bagian dari konsep Islam tentang manusia karena etos kerja adalah bagian dari proses eksistensi dari manusia dalam lapangan kerja kehidupannya yang amat luas dan kompleks. Dalam Al-Quran (QS. Hud: 61) yang telah dijelaskan bahwa manusia diangkat Tuhan menjadi wakil-Nya di muka bumi agar manusia dapat memakmurkannya.



Artinya: *Dan kepada kaum Samud (kami utus) saudara mereka, saleh. Dia berkata “wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari Buni (tanah) dan menjadikanmu pemakmurannya, karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (do’a hambanya). (QS. Hud: 61).*

Dalam menghadapi tuntutan masyarakat tersebut, timbul fenomena baru. Antara lain munculnya pasar-pasar modern seperti, Mal, Supermarket, Departement store dan Shopping centere. Hal itu kadang kurang terencana. Khususnya dalam penempatan lokasi dan sinergitas dengan pedagang kecil, menengah, koperasi, dan pasar tradisional. Akibatnya keberadaan pasar-pasar tradisional semakin hari semakin tersingkirkan dengan terhimpit oleh keberadaan pasar modern.

Padahal menurut Hasan kehadiran pasar tradisional mengandung nilai budaya. Di mana saat terjadi transaksi tawar-menawar antara penjual dan pembeli juga akan menimbulkan keakraban. Bahkan berdasarkan kultur budaya yang ada, pasar tradisional merupan ajang komunikasi dan silaturahmi ( Kadin Provinsi Riau, 2009. 200 ).

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjualan dan pembeli secara langsung. Dalam pasar tradisional terjadi proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios, atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh para penjual, baik para pedagang kaki lima maupun pedagang-pedagang pasar lainnya. Kebanyakan dari mereka ialah menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti pakaian, sepatu atau sandal, jilbab, tas, para pengguna aksesoris, barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu ada pula yang menjual kue, makanan, minuman dan barang-barang kebutuhan sehari-hari ( Kasmir, 2006. 159 ).

Pedagang kaki lima yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pingir-pingir jalan raya untuk mengais rezeki dengan menggelar dagangannya atau gerobaknya di pingir-pingir perlintasan jalan raya. Bila melihat sejarah dari permulaan adanya pedagang kaki lima sudah ada sejak masa Kolonial Belanda.

Seiring berjalannya waktu para pedagang kaki lima ini tetap ada hingga sekarang, namun ironisnya para pedagang ini telah dianggap mengganggu para pengguna jalan karena pedagang telah memakan ruas jalan dalam menggelar dagangannya. Pedagang kaki lima adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat fasilitas umum, seperti pingir-pingir jalan umum, trotoar dan sebagainya. Pedagang yang menjualkan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindah, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usaha.

Sektor informal terus berkembang dalam penyerapan tenaga kerja yang tidak tertampung disektor formal, hal ini dikemukakan ( Wirhadikusumah dalam parid, 2003. 67 ). Selain itu keberadaan sektor informal pedagang kaki lima juga menguntungkan konsumen dari kalangan masyarakat ekonomi menengah kebawah. Karena pedagang kaki lima mampu menyediakan barang-barang kebutuhan dengan harga yang relatif rendah.

Memang tidak bisa dipungkiri sektor informal saat ini tidak mendapatkan tempat yang tepat dalam konteks kebijakan pemerintah adalah

para pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima ini mungkin dalam arti negatif dan positif. Menteri tenaga kerja serta ketua Kadin Pusat, telah mencanangkan agar kehidupan pedagang kaki lima agar kehidupan pedagang dibina, diatur, jangan dikejar-kejar, jangan dimatikan, mereka sudah turut menyumbang andil dalam membangun lapangan kerja. Pedagang kaki lima sangat membantu konsumen mudah mendapat barang, servis cepat, sambil lewat di kaki lima, dapat membeli sekedar oleh-oleh buat anaknya.

Meskipun demikian keberadaan pedagang kaki lima sering dianggap sebagai sumber permasalahan, khususnya di Kota Pekanbaru. Hal ini terjadi karena pedagang kaki lima sering menggunakan ruang publik, yang seharusnya bukan untuk berjualan tetapi digunakan untuk melakukan aktivitas perdagangan. Akibatnya selain mengganggu ketertiban dan keindahan. Para pengguna jalan juga dirugikan dengan menyempitnya ruas jalan, sehingga lalu lintas menjadi terhambat karena tidak leluasa bergerak dan pada akhirnya kemacetan tidak dapat dihindari ( Obsesvasi, 28-01-2014 ).

Permasalahan pedagang kaki lima merupakan suatu permasalahan prioritas di Kota Pekanbaru. Pertumbuhan pedagang kaki lima dari tahun ketahun semakin pesat dan tidak terkendalikan. Jumlah pedagang kaki lima di seluruh kota pekanbaru pada tahun 1996 hanya terdapat 2.140 PKL, tahun 1994 bertambah menjadi 6.340 PKL, tahun 2002 meningkat menjadi 10.350 PKL, tahun 2004 mencapai sekitar 12.000 PKL. Permasalahan pedagang kaki lima kemudian dimasukkan kedalam RPJM kota Pekanbaru periode 2010-2014. Meskipun sudah dilakukan penertiban tapi hal ini tidak membuat pedagang kaki lima yang berdagang di sepanjang bahu jalan kurang secara signifikan ( Disprindagkop Kota Pekanbaru ).

Melihat perkembangan yang kian maju, adanya kehadiran pedagang kaki lima akan memunculkan persoalan baru bagi pemerintah kota. Apalagi yang dihadapi dalam permasalahan pedagang kaki lima adalah penempatan lokasi yang tepat. Tentu saja yang dimaksud penempatan kios-kios dagang yang tidak memiliki izin berjualan dipingir-pingir jalan.

Pemerintah harus mensinergikan aturan-aturan yang ada, termasuk peraturan presiden ( Perpres ) No. 112 / 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

Kemudian keputusan Menteri perindustrian dan dagang No. 261 / MPR/ Kep /7 97 tentang pembentukan TIM penataan dan pembinaan pasar dan pertokoan pusat ( Kadin Provinsi Riau, 2009. 202 ).

Dengan adanya kebijakan tersebut dapat diambil untuk mensinergikan kepentingan antara pemerintah dengan pedagang kaki lima. Karena dengan membuat kebijakan tentang relokasi atau penempatan yang tepat untuk pedagang kaki lima yaitu, dengan cara menyediakan lahan strategis untuk pemasaran barang dagangan para pedagang kaki lima tersebut. Maka dalam hal ini kepentingan pedagang kaki lima dapat terpenuhi dan tentunya dalam hal inipun pemerintah dapat mempertimbangkan juga bahwa lahan tersebut tidak mengganggu keteriban dan kenyamanan kota. Maka intinya diharapkan kepentingan pemerintah dan pedagang kaki lima dapat terpenuhi, sehingga dapat terciptanya suatu format penyelesaian kebijakan dengan mendapatkan solusi, yang berarti kebersihan, keindahan dan kerapihan kota dapat terwujud, kesejahteraan rakyat pedagang kaki lima pun dapat terwujud ( Ridwan HR, 2006. 138 ).

Dari hasil pengamatan penulis di Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru juga terdapat pasar malam (tradisional) yang sebagian besar pedagangannya adalah para pedagang kaki lima, pedagang kecil atau pun yang sering kita kenal dengan usaha kecil menengah (UKM). Salah satunya adalah Pasar malam PUSKOPAU yang terletak di Jalan Pepaya Kelurahan Jadirejo Sukajadi Pekanbaru, yang sekarang ini belum mendapatkan kebijakan yang tepat untuk lokasi yang tepat oleh pemerintah (Observasi 30-01-2014).

Melihat fenomena di atas maka penulis termotivasi untuk melanjutkan penelitian ke dalam bentuk skripsi dengan judul: ***"Tanggapan Pedagang Kaki Lima Mengenai Relokasi Pasar malam PUSKOPAU Jl. Pepaya Kelurahan Jadirejo Kec. Sukajadi Pekanbaru"***.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Adapun yang menjadi alasan bagi penulis untuk memilih judul di atas adalah sebagai berikut:

1. Menurut penulis masalah ini perlu diteliti karena penulis ingin mengetahui tanggapan pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah kota mengenai relokasi.
2. Permasalahan ini sangat relevan sekali dengan jurusan tempat penulis menimba ilmu, sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin menyumbangkan buah pikiran terhadap jurusan, sekaligus terhadap masyarakat penulis melakukan penelitian.
3. Penulis merasa mampu untuk melaksanakan penelitian ini baik tinjauan dari segi waktu, pemikiran maupun biaya.

### C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam bacaan, pemahaman dan redaksi skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk mejelaskan istilah-istilah yang dipakai sebagai berikut:

1. Tanggapan adalah merupakan interaksi dengan perorangan atau kelompok masyarakat, terlihat dari adanya aksi dan reaksi serta mengandung rangsangan. Tanggapan merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan (Soerjono Soekanto, 1975. 58-60).
2. Masyarakat adalah merupakan keseluruhan hubungan-hubungan ekonomis, baik produksi maupun komunikasi yang berasal dari kekuatan-kekuatan produksi ekonomis, yakni teknik dan karya. Masyarakat merupakan yang menghasilkan sebuah kebudayaan (Kamanto Suharto, 2004. 157).
3. Pedagang kaki lima adalah merupakan sebuah komunitas yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pingir jalan raya untuk mengais rezeki dengan menggelar dagangannya atau gerobaknya dipingir-pingir perlintasan jalan raya (Elisa, 2008. 23).
4. Kebijakan pemerintah adalah merupakan ketentuan-ketentuan yang dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dari aparatur pemerintah, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu dan golongan ke dalam ruangan lingkup nasional dan lingkup wilayah/daerah (<http://www.scribd.com/formulasi-kebijakan-publik>).



5. Relokasi adalah merupakan perpindahan atau pemindahan lokasi, baik suatu industri maupun tempat berdagang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan alasan-alasan tertentu (Iman Nugraha, 2008. 12).

Jadi dalam penegasan istilah ini diatas dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah seperti apakah tanggapan pedagang kaki lima yang ada di pasar malam PUSKOPAU terhadap kebijakan pemerintah mengenai relokasi yang terdapat di Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi Pekanbaru.

#### **D. Permasalahan**

##### **1. Identifikasi Masalah**

- a. Apa akibat yang ditimbulkan dari perpindahan lokasi pasar Cut Nyakdin ke pasar Puskopau terhadap pedagang kaki lima yang terdapat di Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi Pekanbaru?
- b. Bagaimana tanggapan pedagang kaki lima mengenai relokasi pasar malam kelurahan jadirejo kecamatan sukajadi pekanbaru?
- c. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi tanggapan pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah kota mengenai relokasi pasar malam Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi Pekanbaru?
- d. Apa pengaruh yang ditimbulkan dengan adanya tanggapan pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah mengenai relokasi pasar malam Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi Pekanbaru?
- e. Dengan adanya perpindahan pasar Cut Nyakdin ke pasar Malam Puskopau apakah mempunyai pengaruh terhadap penghasilan pedagang kaki lima?

## 2. Pembatasan Masalah

Karena banyaknya masalah yang ada diidentifikasi dan didasarkan atas keterbatasan penulis baik tenaga, waktu, maupun biaya, maka penulis merasa perlu untuk membatasi masalah yang akan diteliti yaitu:

Tanggapan pedagang kaki lima mengenai relokasi pasar malam kelurahan jadirejo kecamatan sukajadi pekanbaru.

## 3. Rumusan Masalah

Dari hasil pembatasan masalah diatas maka dapat dirumuskan suatu masalah yang akan menjadi kajian utama dalam penelitian ini, yaitu:

Bagaimana tanggapan pedagang kaki lima mengenai relokasi pasar malam Puskopau Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi Pekanbaru?

## **E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui tanggapan pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah kota mengenai relokasi pasar malam Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi Pekanbaru.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini berguna sebagai bahan informasi bagi para Aparatur Pemerintah setempat, para pedagang dan masyarakat, yang ada di Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi Pekanbaru, tentang tanggapan pedagang kaki lima mengenai relokasi pasar malam.
- b. Untuk mengembangkan pemahaman dan wawasan memperkaya pustaka tentang kajian ilmu-ilmu sosial lainnya yang berkaitan dengan disiplin keilmuan terutama masalah relokasi pasar pedagang kaki lima.

- c. Sebagai kontribusi (masukan) dalam dunia pendidikan tempat penulis menuntut ilmu.

## **F. Kerangka Teoritis Dan Konsep Operasional**

### **1. Kerangka Teoritis**

Dalam penjelasan arah dan tujuan penelitian ini, maka perlu diberikan beberapa teori dan ketentuan-ketentuan serta aturan-aturan hukum yang dapat memberikan solusi yang erat kaitannya dengan masalah penelitian ini yang telah dirumuskan diatas, agar dapat memberikan pemecahan penelitian yang jelas dalam menganalisa data maka arus adanya teori sebagai landasan pemikiran penelitian ini.

Terlebih dahulu dikemukakan teori adalah merupakan rangkaian konsep dan defenisi yang berkaiatan serta bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis tentang suatu fenomena, dengan menunjukkan hubungan yang khas antara variabel-variabel, dengan tujuan untuk menjelaskan, memperkirakan dan menduga fenomena tersebut (Kerlinger, 1973. 34).

#### **a. Tanggapan**

##### **1. Pengertian tanggapan**

Tanggapan merupakan sebagai gambaran ingatan dari pengamatan, dalam mana objek yang telah diamati tidak berada lagi dalam ruangan dan waktu pengamatan, jika proses mengamati sudah berhenti (Abu Ahmadi, 1998. 64).

Sujanto (1995. 67) menjelaskan bahwa tanggapan adalah merupakan gambaran pengamatan yang tinggal dalam kesadaran setelah mengamati.

Menurut Gulo (1996. 32) respon adalah suatu reaksi atau jawaban yang bergantung pada stimulus atau merupakan hasil stimulus tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, respons dapat diartikan sebagai suatu tanggapan, reaksi dan jawaban. Marbun dalam Kamus Politik, menyatakan bahwa respons adalah tanggapan, reaksi dan jawaban, sedangkan reaksi adalah kegiatan berupa aksi, protes dan sebagainya, yang timbul akibat suatu gejala atau peristiwa dan tanggapan atau respons terhadap suatu aksi.

Definisi lain diungkapkan oleh Swatha dan Handoko, ia mendefinisikan respons sebagai predisposisi (keadaan mudah terpengaruh) untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan lingkungan, yang dapat memulai atau membimbing tingkah laku orang tersebut.

Respons merupakan reaksi terhadap stimulus yang terbatas pada perhatian persepsi, pengetahuan, kesadaran dan sikap yang terjadi pada orang yang menerima stimulus tersebut (Arisandi.com/pengertian-perilaku/11 februari 2012).

Dari beberapa definisi dan pendapat para ahli yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tanggapan adalah hasil dari mengamati, melihat, menanggapi dan pengalaman terhadap suatu objek yang tinggal dalam ingatan seseorang melalui panca indra yang kemudian dimaknai dan ditafsirkan dalam hal ini tanggapan pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah kota mengenai relokasi Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi Pekanbaru, apabila menggunakan pengamatan dan pengalaman panca indra yang baik, tentu masyarakat akan memberikan tanggapan tentang kebijakan pemerintah kota mengenai relokasi pedagang kaki lima tersebut dengan seksama dan hasilnya juga lebih akurat.

## 2. Macam-macam tanggapan

Menurut Simon, tiga tingkatan respon terhadap situasi fisik dan non fisik yaitu,

### a) Persepsi

Adalah tindakan penilaian (dalam sikap seseorang) terhadap baik buruknya obyek berdasarkan faktor keuntungan dan kerugian yang akan diterima dari bidangnya obyek tertentu.

### b) sikap

Adalah ucapan secara lisan atau pendapat orang menerima atau menolak obyek tersebut.

c) Tindakan

Adalah kegiatan nyata untuk peran serta atau tindakan terhadap suatu kegiatan yang terkait dengan onyek tersebut.

3. Faktor yang Mempengaruhi Respon

- a) Kondisi status sosial ekonomi.
- b) Tingkat pengetahuan tentang manfaat dari resiko yang diterima.

Respon adalah sasaran tanggapan reaksi

Proses teori komunikasi adalah karena timbal balik dari apa yang dikomunikasikan.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Steven M. Caffee, respon dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Kognitif,

Yaitu respon yang berkaitan erat dengan pengetahuan keterampilan dan informasi seseorang mengenai sesuatu.

2. Afektif

Yaitu, respon yang berhubungan dengan emosi, sikap, dan menilai seseorang terhadap sesuatu.

3. Konatif

Yaitu, respon yang berhubungan dengan perilaku nyata yang meliputi tindakan atau perbuatan (Sandra Pratama Sutrisno. 2011, 7).

#### 4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tanggapan

##### a) Faktor alamiah

Yaitu tanggapan yang di dapat dari penangkapan panca indra secara alamiah, ini tidak lepas dari pengamatan. Pengamatan merupakan proses mengenal dunia luar dengan menggunakan indera (Sujanto, 1990: 61).

##### b) Faktor perhatian

Tanggapan muncul karena adanya perhatian kepada perangsang yang ada di sekitar indera, adanya perangsang yang mengenai alat indera, adanya kontak langsung yang menghubungkan perangsang itu ke otak, dan adanya kesadaran terhadap perangsang itu (Sujanto, 2001: 22).

Tanggapan muncul karena adanya perhatian, yang kemudian memunculkan penilaian terhadap objek yang diamati. Penilaian adalah merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek berdasarkan atas tujuan tertentu (Thoha, 1996: 1).

Artinya bahwa ketika indera menerima rangsangan, maka tanggapan yang muncul itu tergantung kepada frekuensi atau lamanya indera menerima rangsangan itu. Jadi semakin lama atau semakin sering indera menerima rangsangan, maka akan semakin banyak tanggapan yang muncul.

##### b. Pedagang Kaki Lima

## 1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima yang disebut dengan PKL merupakan sebuah komunitas yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pingir jalan raya untuk mengais rezeki dengan menggelar dagangannya atau gerobaknya dipingir-pingir perlintasan jalan raya.

Sementara menurut peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 41 Tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dijelaskan pedagang kaki lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap (Pemko, 2013. 1).

Pedagang kaki lima merupakan usaha informal yang bergerak dalam distribusi barang dan jasa. Pedagang kaki lima disatu sisi merupakan salah satu penerak dalam perekonomian masyarakat pinggiran (Mulyadi S, 2003. 90).

Pedagang kaki lima yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pingir jalan raya untuk mengais rezeki dengan menggelar dagangannya atau gerobaknya di



pinggir-pinggir perlintasan jalan raya. bila melihat sejarah dari permulaan adanya pedagang kaki lima sudah ada sejak masa penjajahan Kolonial Belanda.

Pada masa penjajahan Kolonial peraturan pemerintah waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk para pedestrian atau pejalan kaki yang sekarang ini disebut dengan trotoar. Lebar luas untuk sarana bagi pada pejalan kaki adalah kaki atau 5 feet ( feet = satuan panjang yang umum digunakan di Britania Raya dan Amerika Serikat ). 1 kaki adalah sekitar sepertiga meter atau tepatnya 0,3048 m. Maka 5 kaki adalah sekitar asatu setengah meter. Selain itu pemerintah juga menghimbau agar sebelah luar dari trotoar diberi ruangan yang agak lebar dari pemukiman penduduk untuk dijadikan taman sebagai penghijau dan resapan air.

Dengan adanya tempat yang agak lebar itu kemudian para pedagang mulai banyak menempatkan gerobaknya untuk sekedar beristirahat sambil menunggu adanya para pembeli yang membeli dagangannya. Seiring perjalanan waktu banyak pedagang yang memanfaatkan lokasi tersebut sebagai tempat untuk berjualan sehingga mengundang para pejalan kaki yang kebetulan lewat untuk membeli makan, minum sekaligus beristirahat. Berawal dari itu maka pemerintah Kolonial

Belanda menyebutkan mereka sebagai pedagang kaki lima buah pikiran dari pedagang yang berjualan di area pinggir perlintasan pejalan kaki atau trotoar yang mempunyai lebar lima kaki.

Seiring berjalannya waktu para pedagang kaki lima ini tetap ada hingga sekarang, namun ironisnya para pedagang ini telah dianggap mengganggu para pengguna jalan karena pedagang telah memakan ruas jalan dalam mengelarkan dagangannya. Pedagang kaki lima adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat fasilitas umum, seperti pingir-pingir jalan umum, trotoar, dan sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan usahanya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dibongkar pasang dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usaha.

Undang-undang yang bisa digunakan untuk melindungi para pedagang kaki lima dan masyarakat miskin pada umumnya:

- a. Pasal 11 UU Nomor 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia: “setiap orang berhak atau pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak”
- b. Pasal 13 UU Nomor 09/1995 tentang usaha kecil:” pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek

perlindungan, dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan”.

Dilihat dari kegiatan operasionalnya, pedagang kaki lima dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Pedagang kaki lima tertata, menempati lokasi yang sudah ditetapkan pemerintah dan memperoleh izin resmi.
- b. Pedagang kaki lima binaan yang menempati lokasi daerah larangan. Pedagang kaki lima binaan ini mendapat pengawasan khusus dan ditarik retribusi. kelompok pedagang kaki lima ini diarahkan ke lokasi usaha yang ditetapkan pemerintah.

Adapun pengertian pedagang kaki lima dapat dijelaskan melalui ciri-ciri umum yang digunakan oleh ( Kartono dkk, 1980. 78 ), yaitu:

1. Merupakan pedagang yang kadang-kadang juga sekaligus berarti produsen.
2. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ketempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong, tempat atau stan yang tidak permanent serta bongkar pasang).
3. Menjajakan bahan makanan, minuman, barang-barang konsumsi lainnya yang tahan lama secara eceran.

4. Umumnya bermodal kecil, kadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan menetapkan sekedar komisi sebagai imbalan atas jerih payah.
5. Kualitas barang-barang yang diperdagangkan relatif rendah biasanya tidak standar.
6. Tawar menawar antara penjual dan pembeli merupakan relasi ciri yang khas pada usaha pedagang kaki lima.
7. Dalam melaksanakannya pekerjaannya ada yang secara penuh, sebagian lagi melaksanakan setelah kerja atau pada waktu senggang, dan ada pula yang melaksanakan musiman. Keberadaan sektor informal (PKL) juga tidak dapat dilepaskan dari proses pembangunan.

b. Macam-macam pedagang

1. Menurut barang yang diperdagangkan, pedagang dapat digolong menjadi : pedagang hasil bumi, tambang dan sebagainya.
2. Menurut jumlah barang yang jual, pedagang dapat digolongkan menjadi : pedagang besar (grosir), menengah dan kecil (eceran).
3. Menurut daerah, pedagang dapat digolongkan menjadi : pedagang lokal, antar pulau, internasional dan sebagainya.

c. Faktor penyebab adanya pedagang kaki lima

1. Kurangnya lapangan kerja

2. Mudah mendapatkan keuntungan
3. Adanya kerja sama atau timbal balik antara pengusaha besar dan pengusaha kecil
4. Faktor kebutuhan dan tekad (faktor ekonomi).

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) memang tidak dapat ditepis. Dan hampir setiap negara yang ada di dunia ini menghadapi problem pedagang kaki lima. Di negara maju Amerika dan negara Eropa pun tidak luput dari geliat pedagang kaki lima, termasuk di negara Indonesia lebih tepatnya lagi di kota Pekanbaru, keberadaan pedagang kaki lima telah memenuhi pingir-pingir jalan kota.

Melihat perkembangan yang kian maju, adanya kehadiran pedagang kaki lima akan memunculkan persoalan baru bagi pemerintah kota. Apalagi yang dihadapi dalam permasalahan pedagang kaki lima adalah penempatan relokasi (lokasi) yang tepat. Tentu saja yang dimaksud penempatan kios-kios dagang yang tak memiliki izin berjualan dipingir-pingir jalan.

Ternyata masih banyak masyarakat modern yang ada di kota Pekanbaru yang berbelanja di pasar-pasar tradisional, seperti pasar Malam yang berada di Jalan Pepaya Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi, karena masih banyaknya budaya-budaya tawar menawar di kalangan konsumen dan produsen, sehingga tercapainya kepuasan antara pembeli dan penjual.

Keberadaan pedagang kaki lima memang selalu dipermasalahkan oleh pemerintah karena ada beberapa alasan, yaitu diantaranya:

1. Menggunakan ruang publik oleh pedagang kaki lima bukan untuk fungsi semestinya karena dapat membahayakan orang lain maupun pedagang kaki lima itu sendiri.
  2. Pedagang kaki lima membuat tata ruang kota menjadi kacau
  3. Keberadaan pedagang kaki lima tidak sesuai dengan Visi kota yaitu yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapian kota
  4. Pencemaran lingkungan yang sering dilakukan oleh pedagang kaki lima
  5. Pedagang kaki lima menyebabkan kerawanan sosial
  6. Kemungkinan terjadinya persaingan tidak sehat antara pengusaha yang membayar pajak resmi dengan pelaku ekonomi informal yang tidak membayar pajak resmi.
- d. Dampak yang disebabkan pedagang kaki lima
1. Dampak positif dari hadirnya pedagang kaki lima

Pada umumnya barang-barang yang diusahakan PKL memiliki harga yang tidak tinggi, tersedia di banyak tempat, serta barang yang beragam, Sehingga PKL banyak menjamur di sudut-sudut kota, karena memang sesungguhnya pembeli utama adalah kalangan menengah kebawah yang memiliki

daya beli rendah, Dampak positif terlihat pula dari segi sosial dan ekonomi karena keberadaan PKL menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi kota karena sektor informal memiliki karakteristik efisien dan ekonomis. Hal ini dikarenakan usaha-usaha sektor informal bersifat subsisten dan modal yang digunakan kebanyakan berasal dari usaha sendiri. Modal ini sama sekali tidak menghabiskan sumber daya ekonomi yang besar.

## 2. Dampak negatif dari hadirnya pedagang kaki lima

PKL mengambil ruang dimana-mana, tidak hanya ruang kosong atau terabaikan tetapi juga pada ruang yang jelas peruntukannya secara formal. PKL secara illegal berjualan hampir di seluruh jalur pedestrian, ruang terbuka, jalur hijau dan ruang kota lainnya. Alasannya karena aksesibilitasnya yang tinggi sehingga berpotensi besar untuk mendatangkan konsumen.

Akibatnya adalah kaidah-kaidah penataan ruang menjadi mati oleh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akibat keberadaan PKL tersebut. Keberadaan PKL yang tidak terkendali mengakibatkan pejalan kaki berdesak-desakan, sehingga dapat timbul tindak kriminal (pencopetan) Mengganggu kegiatan ekonomi pedagang formal karena lokasinya yang cenderung memotong jalur pengunjung seperti

pinggir jalan dan depan toko Dan sebagian dari barang yang mereka jual tersebut mudah mengalami penurunan mutu yang berhubungan dengan kepuasan konsumen (Andrian, 2012. 10).

## 2. Kebijakan Pemerintah

### a) Pengertian Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah adalah merupakan istilah kebijaksanaan atau kebijakan yang diterjemahkan dari kata *policy* memang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum (<http://www.scribd.com>).

Menurut (HR Ridwan, 2006. 56) tentang kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai relokasi pedagang kaki lima, yaitu diantaranya bagi mana pemerintah memiliki otoritas untuk membuat kebijakan yang bersifat mengikat. Dalam proses pembuatan kebijakan terdapat dua model pembuatan, yang bersifat *top-down* dan *bottom-up*. Idealnya proses pembuatan kebijakan hasil dari dialog antara masyarakat dengan pemerintah. Sehingga kebijakan tidak bersifat satu arah kembali pada persoalan pertama, bahwa pemerintah dalam hal ini memiliki suatu kebijakan untuk menangani masalah pedagang kaki lima, yaitu suatu kebijakan yang melarang keberadaan pedagang kaki lima dengan dikeluarkannya perda (Peraturan Daerah) (Bappeda, 2004).



Fenomena pedagang kaki lima dan masalah yang ditimbulkan pedagang kaki lima dianggap menyulitkan dan menghambat pemerintah untuk mewujudkan sebuah kota yang bersih dan tertib salah satunya, walaupun pemerintah telah membuat kebijakan Perda (Peraturan Daerah) untuk melarang keberadaan pedagang kaki lima, faktanya jumlah pedagang semakin banyak dan tentu kebijakan perda tersebut menuai kontra dari pedagang kaki lima karena kebijakan pemerintah dianggap tidak tepat, tidak adil dan merugikan para pedagang kaki lima (Subarsono A.C, 2012. 79).

Masalah pedagang kaki lima merupakan masalah klasik yang sudah ada. Banyak cara yang telah ditempuh pemko Pekanbaru dalam menangani pkL ini, diantaranya melalui penertiban dan relokasi yang dilakukan oleh Dinas Pasar atau Satpol pp, dimana selalu ada langkah-langkah dan tindakan dalam menangani pkL ini. Langkah-langkah tersebut diambil dengan berpedoman pada Perda yang telah disahkan DPRD kota Pekanbaru No. 41 Tahun 2012 tentang penataan pemberdayaan dan pembinaan pkL (Pemko, 2012).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang koordinasi penataan pedagang kaki lima sebagai berikut:

1. Pasal 6 Nomor 125 mengenai Bupati atau Walikota melaksanakan penataan PKL Kabupaten/ kota di wilayah dengan berpedoman kepada kebijakan penataan PKL sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (4) dan penataan PKL Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal (5).
  2. Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
    - a. Penetapan kebijakan penataan PKL.
    - b. Penetapan lokasi dan/ atau kawasan tempat berusaha PKL di dalam rencana detil tata ruang.
    - c. Penataan PKL melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah.
    - d. Penyusunan program dan kegiatan penatan PKL kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- b) Alternatif Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah yaitu dilakukan dengan pemikiran yang rasional dan profesional. Logikanya pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan dalam hal ini relokasi. Relokasi tersebut adalah pemerintah berupaya mencari solusi atas permasalahan pedagang kaki lima. Dengan dikeluarkannya kebijakan relokasi, pemerintah dapat mewujudkan tata kota yang indah dan bersih, namun juga dapat memberdayakan keberadaan pedagang kaki lima untuk menopang ekonomi daerah. Pemberdayaan pedagang kaki

lima melalui relokasi tersebut ditunjukan untuk formulasi sektor informal, artinya dengan di tempatkannya pedagang kaki lima pada kios-kios yang disediakan, maka pedagang kaki lima telah ilegal menurut hukum. Sehingga dengan adanya legalisasi tersebut pemko (Pemerintah Kota) dapat menarik redistribusi secara dari pedagang agar masuk kas pemerintah dan tentunya akan semakin menambah pendapatan asli daerah (Nugraha, 2008. 12).

Pemerintah kota mengeluarkan kebijakan yang isinya antara lain:

1. Pedagang kaki lima dipindah lokasi ke tempat yang telah disediakan pemerintah berupa kios-kios.
2. Bagi pedagang yang tidak pindah dalam jangka waktu 90 hari setelah keputusan ini dikeluarkan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku (Kadin Provinsi Riau, 2009. 35).
3. Relokasi
  - a) Pengertian Relokasi

Relokasi adalah merupakan perpindahan atau pemindahan lokasi, baik suatu industri maupun tempat berdagang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan alasan-alasan tertentu (Iman Nugraha, 2008. 12).

Suatu kegiatan informal pada dasarnya harus memiliki suatu lokasi yang tepat agar dapat memperoleh keuntungan yang lebih

banyak dari tempat lain dan untuk mencapai keuntungan yang maksimal, suatu kegiatan harus seefisien mungkin.

Richhardson (1991) berpendapat bahwa keputusan-keputusan penentuan lokasi yang memaksimumkan penerimaan biasanya diambil bila memenuhi kriteria-kriteria pokok:

- 1) Tempat yang memberi kemungkinan pertumbuhan jangka panjang yang menghasilkan keuntungan yang layak.
- 2) Tempat yang luas lingkungannya untuk kemungkinan perluasan unit produksi.

Lokasi pedagang kaki lima sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kelangsungan usaha para pedagang kaki lima, yang pada gilirannya akan mempengaruhi pula volume penjualan dan tingkat keuntungan. Secara garis besar kesulitan yang dihadapi oleh para pedagang kaki lima berkisar antara peraturan pemerintah mengenai penataan pedagang kaki lima belum bersifat membangun atau konstruktif, kurangnya modal, kurangnya fasilitas pemasaran, dan belum adanya bantuan kredit. Pedagang kaki lima adalah salah satu usaha dalam perdagangan dan salah satu wujud sektor informal.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang koordinasi penataan pedagang kaki lima sebagai berikut:

1. Pasal 2 UU Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi penataan PKL di laksanakan melalui:
  - a. Penataan dan pendaftaran PKL.
  - b. Penataan lokasi PKL.
  - c. Pemindahan dan penghapusan lokasi PKL.
  - d. Penerjemah lokasi PKL.
  - e. Perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL.
2. Penataan lokasi PKL sebagaimana dimasud pada ayat (1) merupakan lokasi binaan yang terdiri atas lokasi permanen dan lokasi sementara yang ditetapkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
3. Pemindahan dan pengapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada lokasi PKL yang bukan peruntukannya.
4. Perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyediaan ruang untuk kegiatan PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
5. Pasal 4 UU Nomor 125 Tahun 2012 tentang koordinasi penataan PKL di laksanakan:
  - a) Menteri Dalam Negeri menetapkan pedoman penataan PKL.

- b) Dalam penataan pedoman penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/ kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Salah satu ciri-ciri mendasar dari sistem kehidupan masyarakat adalah perubahan sosial. Gambarnya adanya perubahan dalam masyarakat dapat dilihat dari adanya unsur-unsur atau komponen masyarakat yang berbeda bila dilihat dari satu titik waktu tertentu dengan titik waktu yang lain pada masa berikutnya.

Perubahan sosial dan pembangunan ekonomi merupakan satu upaya pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dan pembangunan ekonomi dalam masyarakat, khususnya perubahan sosial dan ekonomi pedagang.

Pembangunan yang terpusat dan tidak merata yang dilakukan selama ini ternyata hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi serta tidak diimbangi kehidupan sosial, politik yang demokratis, yang telah menyebabkan krisis moneter dan ekonomi nyaris berlanjut dengan krisis normal yang memperihatinkan (Adrian Charles F, 1992).

M P. Torado ( 1994 ) merumuskan pembangunan sebagai proses yang berdimensi jamak melibatkan perubahan besar dalam,

1. Struktur sosial
2. Percepatan pertumbuhan ekonomi

### 3. Pengangguran ketidak merataan.

Aktualisasi dari pembaharuan tersebut dengan dikeluarkannya kebijakan pertumbuhan ekonomi yang tertuang dalam Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004(Tap MPR No.IV/MPR/1999). Yaitu:

1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar
2. Mengembangkan kebijakan industri, perdagangan dan investasi
3. Memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar lebih efisien dan produktif.

Dengan adanya kebijakan tersebut maka terbantulah pertumbuhan ekonomi para pedagang, khususnya pedagang kaki lima ( Laboratorium Pancasila IKIP, 1983 ).

## **2. Konsep Operasional**

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap konsep teoritis. Guna untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap penelitian ini oleh pihak pembaca, maka istilah-istilah pokok yang khusus dalam penelitian ini perlu dibuat dalam konsep operasional yang diartikan sebagai pengertian khusus yang berlaku dalam penelitian ini. Konsep ini menjelaskan variable yang akan dijadikan sebagai tolak ukur dilapangan sesuai dengan rumusan masalah yang telah penulis paparkan.

Tanggapan pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah kota mengenai relokasi Pasar Malam (PUSKOPAU) Jalan Pepaya Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi Pekanbaru adalah dengan indikator sebagai berikut:

### **1. Persepsi**

- a) Pasar malam tidak merugikan minat pembeli untuk berbelanja kepada pedagang kaki lima.
- b) Pasar malam dapat menguntungkan pedagang kaki lima.
- c) Kenyamanan, ketertiban penjual dan pembeli.

### **2. Sikap**

- a) Tanggapan pedagang kaki lima terhadap relokasi pasar malam.
- b) Pedagang kaki lima membayar retribusi pelayanan pasar malam.

### **c) Tindakan**

- a) Kebijakan pemerintah membawa dampak yang baik bagi pedagang kaki lima.
- b) Pemerintah mengajak pedagang kaki lima musyawarah dalam menentukan lokasi.
- c) Pemerintah menyediakan lokasi berjualan bagi pedagang kaki lima.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi Pekanbaru, hal ini dikarenakan pasar malam yang dimaksud



terdapat di Jalan Pepaya Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi Pekanbaru.

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah seluruh pedagang kaki lima yang ada di pasar malam Puskopau Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi Pekanbaru. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah tanggapan pedagang kaki lima mengenai relokasi pasar malam kelurahan jadirejo kecamatan sukajadi pekanbaru.

## 3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pedagang kaki lima yang beragam macam dagangannya yang berda di pasar malam (PUSKOPAU) Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi Pekanbaru. Adapun jumlah pedagang kaki lima yang berada di pasar malam (PUSKOPAU) adalah 150 orang. Syarat yang harus di penuhi dalam pengambilan sampel adalah sampel harus representatif (mewakili) dan besarnya sampelnya harus memadai. Karena keterbatasan kemampuan penulis untuk meneliti semua populasi yang di atas, maka penulis dengan menggunakan teknik purposive sampling, jumlah yang diambil sebagai sampel 15 orang pedagang kaki lima (Suharsimi, 2006:140).

## 4. Sumber Data

### a. Data Primer

Yaitu data yang diambil langsung dari para pedagang kaki lima yang ada di pasar malam Puskopau Kelurahan Jadirejo Kecamatan

Sukajadi Pekanbaru. Untuk maksud tersebut peneliti menggunakan metode wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder meliputi data berupa dokumentasi yang peneliti peroleh dari pengurus pasar malam Kelurahan Jadirejo Pekanbaru dan Dinas Pasar dan Kantor Lurah di Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi Pekanbaru.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dari informasi bagi penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya:

a. Wawancara

Pengumpulan data oleh penelitian dengan cara menanyakan secara langsung kepada pihak yang terkait untuk mendapatkan informasi yang valid, baik itu perekam atau mencatat.

b. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data pencatatan dokumen atau berkas-berkas yang mendukung dalam penelitian ini.

c. Observasi

Yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki, berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan sebagainya (Sugiono, 2011. 56).

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data bertujuan menganalisa data yang telah terkumpul dalam penelitian ini, setelah memperoleh data yang berasal dari lapangan dan disusun secara sistematis, maka penulis akan menganalisa dengan menggunakan teknik Deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan fakta dan gejala yang ada di lapangan, kemudian data tersebut di analisa, sehingga dapat dipahami secara jelas kesimpulannya (Zuriah, 2005. 79).

## H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari satu BAB yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Terdiri dari latar belakang, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, landasan teoritis dan konsep operasional, metode penelitian secara sistematika penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Terdiri dari sejarah Kelurahan Jadirejo, keadaan geografis, visi dan misi pembangunan ekonomi, mata pencarian penduduk, agama dan sosial budaya.

### **BAB III : PENYAJIAN DATA**

Yaitu berisikan tentang tanggapan pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah kota mengenai relokasi.

**BAB IV : ANALISIS DATA**

**BAB V : PENUTUP**

Terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

**DAFTAR PUSTAKAN**